

**KEBUDAYAAN SAMURAI DALAM DIPLOMASI BUDAYA JEPANG  
PADA MASA PERDANA MENTERI SHINZO ABE (2012-2021)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**AHMAD DINOUTOMO**

**NPM 1916071072**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

### KEBUDAYAAN SAMURAI DALAM DIPLOMASI BUDAYA JEPANG PADA MASA PERDANA MENTERI SHINZO ABE (2012-2021)

Oleh

AHMAD DINOUTOMO

Diplomasi budaya Jepang pascaperang bertujuan memperbaiki citra militeristiknya, namun kebudayaan yang ditampilkan dalam instrumen diplomasinya berakar pada kelas samurai tanpa pernah disebut secara resmi. Penelitian ini mendeskripsikan instrumen diplomasi budaya Jepang beserta kaitannya dengan kebudayaan samurai dan nilai-nilai yang diproyeksikan melaluinya pada masa Perdana Menteri Shinzo Abe (2012–2021). Pendekatan kualitatif dengan desain *directed qualitative content analysis* digunakan, dengan *Diplomatic Bluebook* Kementerian Luar Negeri Jepang sebagai sumber primer dan empat instrumen diplomasi budaya Simon Mark sebagai kategori *a priori*. Hasil penelitian menemukan tujuh bentuk kebudayaan, yaitu Teater *Noh*, Teater *Kagura*, *Budo*, *Washoku*, upacara minum teh, *Kimono*, dan *Ikebana*, yang dapat ditelusuri ke kelas samurai melalui koneksi asal-usul, patronase, atau pelekatan nilai. Ketujuhnya memproyeksikan tujuh nilai inti, yaitu kedisiplinan, keindahan, keanggunan, ketenangan, kehormatan, spiritualitas, dan kepercayaan, yang ditransformasikan dari konteks militeristik menuju konteks damai. Pola selektivitas nilai ini bersifat implisit dan menjadi inferensi peneliti yang sejalan dengan gagasan *invention of tradition*.

**Kata kunci:** diplomasi budaya, kebudayaan samurai, Jepang, Shinzo Abe, transformasi nilai

## **ABSTRACT**

### **SAMURAI CULTURE IN JAPANESE CULTURAL DIPLOMACY DURING THE PRIME MINISTERSHIP OF SHINZO ABE (2012-2021)**

**By**

**AHMAD DINOUTOMO**

Japan's post-war cultural diplomacy seeks to repair its militaristic image, yet the culture presented through its diplomatic instruments is rooted in the samurai class without ever being officially named. This study describes the instruments of Japanese cultural diplomacy, their connection to samurai culture, and the values projected through them during the premiership of Shinzo Abe (2012–2021). A qualitative directed qualitative content analysis design is employed, using the Japanese Ministry of Foreign Affairs' Diplomatic Bluebook as the primary source and Simon Mark's four cultural diplomacy instruments as a priori categories. The findings reveal seven cultural forms, namely Noh theatre, Kagura, Budo, Washoku, the tea ceremony, Kimono, and Ikebana, all traceable to the samurai class through connections of origin, patronage, or value attachment. These forms project seven core values, namely discipline, beauty, elegance, calmness, honor, spirituality, and trust, transformed from a militaristic context into a peaceful one. This pattern of value selectivity is implicit and constitutes a researcher's inference consistent with the invention of tradition.

**Keywords:** cultural diplomacy, samurai culture, Japan, Shinzo Abe, value transformation.

**KEBUDAYAAN SAMURAI DALAM DIPLOMASI BUDAYA  
JEPANG PADA MASA PERDANA MENTERI SHINZO  
ABE (2012-2021)**

**Oleh**

**AHMAD DINOUTOMO  
NPM 1916071072**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **Kebudayaan Samurai Dalam Diplomasi Budaya Jepang pada Masa Perdana Menteri Shinzo Abe (2012-2021)**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Dinoutomo**

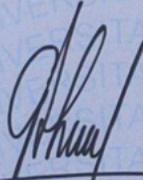
Nomor Pokok Mahasiswa : 19160710072

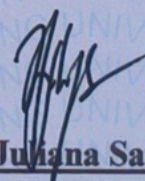
Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

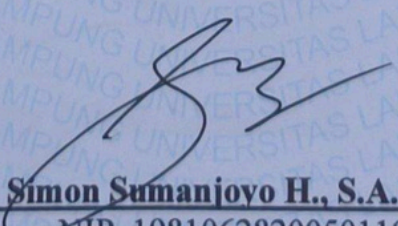


1. Komisi Pembimbing

  
Gita Karisma, S.IP., M.Si  
NIP. 198701282014042001

  
Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.  
NIP. 198807172023212043

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

  
Dr. Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.P.A.  
NIP. 198106282005011003

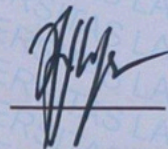
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

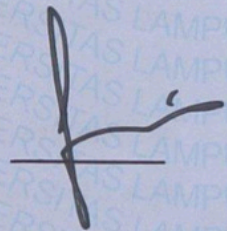
Ketua : **Gita Karisma, S.IP., M.Si.**



Sekretaris : **Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.**



Penguji Utama : **Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si.  
M.B.A**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **8 Juni 2026**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

*Form. A6f*

**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Juni 2026  
Yang menulis pernyataan,



Ahmad Dinoutomo  
NPM. 1916071072

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ahmad Dinoutomo, dilahirkan di Depok pada tanggal 13 April 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putra dari Bapak Arief Budiono dan Ibu Purnaningsih. Pendidikan pertama ditempuh pada tahun 2006-2007 di TK Al-Hasana, Depok. Selanjutnya, penulis melanjutkan jenjang pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Palapa dan tamat pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan

pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 7 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2019. Di tahun yang sama, penulis diterima sebagai Mahasiswa di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional melalui jalur SBMPTN. Pada masa awal perkuliahan, penulis aktif mengikuti kepanitiaan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional. Penulis mengagumi Jepang sebagai negara yang berhasil menjaga warisan budayanya ditengah modernisasi global. Ketertarikan inilah yang menjadi inspirasi utama penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul “Kebudayaan Samurai Dalam Diplomasi Budaya Jepang pada Masa Perdana Menteri Shinzo Abe (2012-2021).”

## **MOTTO**

*“Wubba Lubba Dub-Dub!”*

**(Rick Sanchez)**

*“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever”*

**(Mahatma Gandhi)**

*“Kids who have never seen peace and kids who have never seen war have different values! Those who stand at the top determine what's wrong and what's right! This very place is neutral ground! Justice will prevail, you say? But of course it will! Whoever wins this war becomes justice!”*

**(Donquixote Doflamingo)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah Rabbil 'Alamin.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

**Dengan segala ketulusan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:**

### **Diri Sendiri,**

terima kasih karena tidak pernah menyerah di masa-masa sulit. Terima kasih telah berusaha bangkit dari keputusasaan dan berusaha keluar dari fase kehilangan motivasi. Terima kasih karena selalu menanamkan prinsip bahwa apa yang sudah dimulai harus diselesaikan, karena ini merupakan sebuah tanggung jawab.

### **Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Arief Budiono dan Ibu Purnaningsih,**

atas segala doa dan dukungan yang tak berkesudahan, yang menjadi salah satu sumber kekuatan dalam menyelesaikan pendidikan ini.

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kebudayaan Samurai dalam Diplomasi Budaya Jepang pada Masa Perdana Menteri Shinzo Abe (2012–2021)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Kedua orangtuaku, Ayah dan Mama tercinta, Ayah Arief Budiono dan Mama Nining yang merupakan motivasi terbesar penulis. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang kalian berikan, terima kasih telah membesarkan dan mendidikku menjadi anak yang kuat dan tidak mudah menyerah. Maaf jika saat ini belum bisa memberikan yang terbaik, tapi percayalah anakmu ini akan berusaha sebaik mungkin untuk terus memperbaiki diri hingga di kemudian hari menjadi anak yang pantas untuk dibanggakan. Semoga kalian berdua diberikan umur yang panjang dalam kesehatan dan kebahagiaan;
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
5. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang selalu memberikan masukan dan motivasi, juga sangat sabar membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi;

6. Mba Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi;
7. Mas Fahmi Tarumanegara., S.IP., MSi., M.B.A selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan banyak ide dan rekomendasi mengenai penulisan skripsi;
8. Mas Iyo, Aviero Riesdiyono terima kasih telah menjadi kakak yang menginspirasi penulis, tentang bagaimana cara memandang kehidupan. Semoga masa senang ataupun sulit yang kita lalui bersama-sama dapat menjadi pelajaran yang berharga untuk menjadi individu yang lebih baik;
9. Rasa terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan kerja di PT. Bumi Makmur Mba Putri, Nanda, Mayo, dan Amal terima kasih atas ruang diskusi, wawasan, dan dorongan motivasi yang telah diberikan. Kemudian kepada Tim Lapangan Luthfi dan Kak Ian terima kasih kepada kalian yang sudah menjadi tempat berkeluh kesah, hari-hari bekerja terasa ringan ketika diiringi oleh canda dan tawa bersama kalian;
10. Teman-teman KKN, Iqbal dan Nopri yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah membantu baik dalam urusan kuliah maupun diluar kuliah;
11. Kawan seperjuangan HI yang bersama mengurus penyelesaian skripsi di semester terakhir Zaki, Juan, Hammam, Amel, Faras, dan Cici yang menjadi sumber informasi penulis dalam penyelesaian skripsi;
12. Teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2019 Vladimir, Fira, dan Shinta terimakasih atas kerjasamanya sebagai rekan kelompok yang membantu penulis dalam menjalani perkuliahan.
13. Almameter tercinta Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026



Ahmad Dinoutomo  
1916071072

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	6
2.2. Landasan Konseptual .....	14
2.2.1. Diplomasi Budaya.....	15
2.2.2 Soft Power.....	18
2.2.3 Transformasi dan Selektivitas Nilai Budaya.....	19
2.3. Kerangka Pemikiran.....	20
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	22
3.2. Fokus Penelitian .....	23
3.3. Sumber Data.....	24
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5. Teknik Analisis Data.....	25
3.6. Keterbatasan Penelitian.....	27
<b>IV. PEMBAHASAN</b> .....	<b>29</b>
4.1 Diplomasi Budaya.....	29

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Diplomasi Budaya Jepang .....	29
4.1.2 Shinzo Abe dan Diplomasi Budaya Jepang .....	32
4.2 Gambaran Umum Samurai.....	36
4.2.1 Asal Usul dan Pembentukan Kelas Samurai.....	36
4.2.2 Kebudayaan Samurai .....	39
4.2.3 Transformasi Citra Samurai: Dari Militerisme ke Warisan Budaya.....	42
4.3 Instrumen Diplomasi Budaya Jepang.....	46
4.3.1 Pertunjukan Kelompok Budaya .....	48
4.3.2 Acara Olahraga.....	51
4.3.3 Kuliner .....	55
4.3.4 Pertunjukan dan Pameran Seniman.....	57
4.4 Kebudayaan Samurai sebagai Praktik Instrumen Diplomasi Budaya Jepang .....	63
4.4.1 Teater Noh.....	64
4.4.2 Teater Kagura.....	69
4.4.3 Budo .....	73
4.4.4 Kimono.....	76
4.4.5 Washoku.....	79
4.4.6 Upacara Minum Teh .....	81
4.4.7 Ikebana .....	84
4.5 Nilai-nilai Kebudayaan Samurai dalam Diplomasi Budaya Jepang .....	88
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>93</b>
5.1 Simpulan .....	93
5.2 Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komparasi Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2. Instrumen Diplomasi Budaya Jepang pada Masa Perdana Menteri Shinzo Abe (2012–2021) .....	61
Tabel 3. Matriks Analisis Kebudayaan Samurai Sebagai Instrumen Diplomasi Budaya Jepang.....	92

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	21

## DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
MAFF	: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
METI	: Ministry of Economy, Trade and Industry
MEXT	: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
MOFA	: Ministry of Foreign Affairs
ROK	: Republic of Korea
SICA	: Central American Integration System (Sistema de la Integración Centroamericana)
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Latar belakang dari berbagai diplomasi yang dilakukan oleh Jepang setelah masa peperangan adalah untuk memperbaiki citra sejarah militerisme Jepang yang kelam di kalangan dunia internasional. Oleh karena itu, tujuan dasar diplomasi Jepang terkait dengan sejarah masa lalu ini ialah untuk memperbaiki citra negaranya yang militeris, dan untuk mengoreksi persepsi yang salah ataupun kesalahpahaman oleh negara-negara asing (Nukariya, 2004). Untuk mencapai tujuan ini, Jepang menggunakan pendekatan pertukaran, terutama berfokus pada pertukaran budaya. Tujuan diplomasi Jepang kemudian berkembang menjadi penyebarluasan citra baru untuk memperkuat hubungan Jepang dengan negara lain, lalu membangun hubungan simbiosis koeksistensi yang damai dan sejahtera dengan masyarakat dunia, sehingga menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi diplomasi Jepang. Pendekatan pencitraan dan simbiosis yang digunakan untuk mencapai tujuan ini terus menekankan pentingnya pertukaran budaya dan intelektual (Yoshihide, 2016).

Persepsi mengenai kebijakan luar negeri Jepang yang agresif pada paruh pertama abad ke-20 di kawasan Asia, lalu ditambah dengan persaingan ketat antara negara-negara tetangga di Asia Timur yang sedang berkembang pesat seperti Tiongkok dan Korea Selatan memberikan citra negara kemiliteran yang kuat kepada Jepang (Epova, 2014). Citra yang terbentuk sejak era samurai dimulai di Jepang. Samurai sendiri merupakan kelas/golongan prajurit elit yang hidup di era Tokugawa atau Edo (1615-1867), dimana mereka secara eksklusif memegang tugas-tugas kemiliteran (Patterson, 2012). Pada masa ini, petinggi negara Jepang secara sengaja membangun dan mempromosikan ideologi nasionalis menggunakan serangkaian simbol yang cenderung militeristik merefleksikan sistem pemerintahan kekaisaran. Salah satu simbol ini adalah samurai yang merupakan perwujudan serangkaian

kualitas dan subjek nasional yang ideal yang dituntut untuk ditiru oleh semua masyarakat Jepang (Narroway, 2008).

Kaisar dalam wacana ideologi resmi periode Meiji (1868-1912) dipromosikan secara luas sebagai sosok yang dapat memerintah rakyat atas nama negara (Narroway, 2008). Rakyat diharapkan untuk mencintai juga melayani kaisar, bahkan jika perlu dengan sukarela mengorbankan hidup mereka demi kepentingan kekaisaran (Narroway, 2008). Tuntutan ini merupakan kualitas ideal dari samurai yang ingin dipromosikan negara, termasuk kesetiaan mutlak, kepatuhan terhadap otoritas, dan pengorbanan diri demi kehormatan (Narroway, 2008). Agar hal ini terlaksana dengan baik, lembaga formal sekolah dan sistem militer melakukan pendidikan terhadap anak-anak, wanita dan tentara untuk menerapkan kualitas ideal tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Narroway, 2008). Ideologi yang tertanam ini tidak hanya menghasilkan pasukan militer yang setia, tetapi sifat kejam dan tidak manusiawi juga terbentuk pada pasukan Jepang demi kesetiaan yang dituntut kekaisarannya pada masa perang. Salah satu hal nyata yang dapat menggambarannya adalah peristiwa *ear mound* (1597), dimana samurai memenggal kepala prajurit Korea sebagai bukti kemenangan mereka, namun karena keterbatasan mobilitas, para samurai mengawetkan hidung dan telinga korban yang mereka invasi, lalu membawanya kembali ke Jepang. Untuk dipertontonkan oleh penguasa Jepang kepada warganya, sebagai peringatan agar tidak menantang pihak berwenang (Kristof, 1997). Kejadian seperti ini juga terus terjadi di masa peperangan dunia, memberikan citra yang demikian kejamnya terhadap negara Jepang.

Isu diplomatik mengenai “masalah sejarah” dengan negara-negara tetangga, ditambah dengan lemahnya ekonomi negara pada tahun-tahun awal pasca perang memaksa pemerintah Jepang untuk mencari cara lain untuk bersaing dengan negara-negara lainnya (Epova, 2014). Jepang kemudian memperkokoh strategi-strategi promosi budayanya dalam hal memproyeksikan citra positif serta membangun kemitraan internasional melalui diplomasi budaya (Gadjeva, 2022). Strategi promosi budaya Jepang ini dimulai sejak Perdana Menteri Jepang Ōhira Masayoshi mendeklarasikan datangnya "era kebudayaan" dalam pidato

kebijakannya pada tahun 1979 (Shigeki, 2015), hingga pemerintah Jepang meluncurkan visi baru yang disebut "Visi Abad 21 Jepang", yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 Jepang akan menjadi sebuah "negara yang kreatif secara budaya" pada bulan April 2005 (Otmazgin, 2012). Masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah Jepang berupaya keras untuk mematuhi kebijakan strategis melalui diplomasi budaya. Upaya ini juga didukung oleh kembalinya kekuasaan Abe Shinzo sebagai Perdana Menteri pada bulan Desember 2012, komponen ekonominya sejalan dengan apa yang disebut '*Abenomics*' yang diharapkan Abe dapat meningkatkan perekonomian Jepang, dengan program promosi budaya Jepang sebagai bagian integral dari program pemerintah (Abe, 2013).

Perlu ditegaskan bahwa Jepang tidak pernah secara eksplisit menyebut samurai sebagai bagian dari diplomasi budayanya, baik dalam publikasi diplomasi, pernyataan resmi pemerintah, maupun dokumen kebijakan lainnya. Tidak satu pun dokumen tersebut menempatkan istilah "samurai" sebagai nama atau tujuan dari kegiatan budaya yang diselenggarakan. Namun, dalam beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari instrumen-instrumen diplomasi budaya, seperti contohnya dalam acara internasional Jepang seringkali menyambut tamu dengan penampilan ataupun pertunjukan yang mengandung komponen dari kebudayaan samurai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program atau acara yang disponsori oleh MOFA (the Ministry of Foreign Affairs) setiap tahunnya, seperti: Pertunjukan *kuromori-Kagura* di Perancis, dalam proyek rekonstruksi dari Gempa Besar Jepang Timur (Diplomatic Bluebook 2013, 2013); Acara *beyond kimono* dalam "peringatan 150 tahun Pembentukan Program Pertukaran Budaya Hubungan Diplomatik antara Swiss dan Jepang" (Diplomatic Bluebook 2015, 2015); Acara demonstrasi publik *Budo* oleh Jepang kepada Presiden Vladimir Putin dalam "Tahun Pertukaran *Budo* (Seni Bela Diri) Jepang-Rusia" (Diplomatic Bluebook 2015, 2015).

Selain fakta yang telah disebutkan di atas, peneliti menyadari bahwa selama ini, penelitian yang membahas mengenai samurai mayoritas melihat dari sudut pandang militerisme dan membahas berbagai relevansinya hanya dalam konteks sejarah kelamnya. Oleh karena itu penelitian ini menjadi menarik karena peneliti akan berfokus pada mengkaji kegiatan budaya yang menjadi instrumen diplomasi

budaya Jepang, kemudian peneliti berupaya menjelaskan keterkaitan kegiatan budaya tersebut terhadap samurai. Bagaimana mungkin samurai yang kejam memiliki komponen budaya yang dapat menampilkan kepositifan negara Jepang.

## 1.2. Rumusan Masalah

Samurai dikenal sejarahnya sebagai pasukan militer yang melayani *Shogun*, sebutan bagi kepala pemerintahan pada saat sistem feodal diterapkan pada era *edo* berlangsung di Jepang. Atas dasar tuntutan *Shogun*, samurai memiliki kode etik yang terikat dengan kehormatannya sebagai prajurit, kode ini mengandung nilai-nilai kesetiaan, ketaatan, dan pengorbanan diri terhadap *Shogun*. Meskipun setelah berakhirnya sistem feodal dan pembubaran pasukan yang dikenal sebagai samurai, pada masa perang dunia pasukan militer Jepang tetap menerapkan kode etik tersebut, oleh karenanya meskipun samurai tidak lagi ada, melalui kode etiknya esensi samurai tetap masih hidup. Beralih ke masa modern dimana peperangan tidak lagi terjadi, Jepang melalui upaya diplomasi budaya memfokuskan kebijakannya untuk memperbaiki citra kelamnya sebagai negara militer. Dengan menggunakan instrumen-instrumen diplomasi budaya, Jepang perlahan membentuk ulang citra negaranya sebagai negara positif menggunakan aktivitas dan kegiatan tradisional masyarakatnya yang unik dan menarik.

Posisi Jepang di dunia yang berkaitan dengan krisis identitas, baik identitas nasional maupun budaya. Penafsiran mitos serta cerita tentang masa lalu Jepang dan representasi media yang stereotip telah mempengaruhi penentuan posisi simbolis Jepang di dunia. Penting untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang jenis penyajian masa lalu seperti apa, yang relevan secara budaya dan politik, yang dapat membantu posisi Jepang saat ini. Budaya dapat berkontribusi untuk mendapatkan kredibilitas dalam penyajiannya kepada dunia, dan oleh karena itu, perubahan dalam konseptualisasi dan organisasi strategis diplomasi budaya Jepang menjadi semakin penting.

Menariknya jika dipelajari lebih lanjut budaya yang dipresentasikan oleh instrumen diplomasi budaya Jepang mengandung komponen samurai. Meskipun tidak ada dokumen resmi Jepang yang pernah menyebut samurai sebagai bagian

dari diplomasi budayanya, justru budaya yang mereka tampilkan adalah bagian dari kebudayaan yang dilakukan, dikembangkan, dinikmati, dan dipelajari oleh pasukan militer samurai. Dengan latar belakang tersebut, lalu menggunakan rentang waktu masa jabatan Perdana Menteri Shinzo Abe (2012-2021) sebagai salah satu aktor diplomasi budaya Jepang, penelitian ini memunculkan pertanyaan penelitian: *“Bagaimana budaya samurai digunakan sebagai instrumen diplomasi budaya Jepang pada masa Perdana Menteri Shinzo Abe (2012-2021)?”*

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan instrumen dari diplomasi budaya Jepang dan kaitannya terhadap kebudayaan samurai.
- b. Mendeskripsikan nilai-nilai dari kebudayaan samurai sebagai instrumen diplomasi budaya Jepang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Manfaat Akademis: peneliti berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam kajian hubungan internasional khususnya pada pembahasan diplomasi budaya dan budaya populer. Peneliti juga berharap topik ini akan lebih dieksplor di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung kedepannya.
- b. Manfaat Praktis: peneliti berharap penelitian ini dapat menjawab bagaimana sebuah negara dapat menjadikan daya tarik budaya yang unik menjadi sebuah alat diplomasi budaya, menjadi instrumen efektif dalam mendapatkan perhatian masyarakat internasional sehingga diplomasi budaya dapat menjadi tren yang tidak hanya dipraktikkan oleh negara-negara maju saja tapi juga oleh negara-negara berkembang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti di masa lampau. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu yang membahas kebijakan luar negeri, diplomasi budaya, samurai dan negara Jepang itu sendiri sebagai subjek, konsep, dan fokus utama penelitian. Pada sub-bab ini, peneliti mereview lima artikel yang berkaitan dengan topik penelitian, yakni:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nadejda Gadjeva dengan judul yang dipublikasi oleh *Columbus State University* (Gadjeva, 2022). Artikel ini bertujuan membandingkan *soft approach* Jepang dengan kebijakan negara lain, termasuk Rusia dan China dan apa yang disebut "*sharp power*", sedangkan fitur-fitur khusus diplomasi budaya Jepang didefinisikan sebagai "*kind diplomacy*". Selain itu peneliti juga membahas promosi budaya Jepang yang berorientasi pada propaganda, dimulai pada akhir Perang Dunia II, lalu dilanjutkan dengan fokus pada pendekatan transformasi pasca perang dalam mempromosikan citra positif Jepang ke dunia internasional. Dengan mengeksplorasi evolusi berbagai jenis kebijakan dan inisiatif berorientasi diplomasi dari masa perang hingga pasca perang, pembaruan tujuan kebijakan luar negeri, serta aspek dan elemen budaya tertentu yang dipromosikan di luar negeri. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data *sekunder*.

Nadejda menjelaskan bahwa pada akhir Perang Dunia II promosi budaya Jepang sebagian besar berorientasi propaganda, yang digunakan sebagai asimilasi koloni dan juga instrumen dalam ekspansinya di kawasan Asia. Kebijakan berorientasi propaganda ini berubah setelah berakhirnya Perang Dunia II dan tujuan Jepang secara bertahap berkembang dalam beberapa dimensi. Berbagai macam strategi dan inisiatif diplomasi mulai diterapkan dengan tujuan untuk mengubah persepsi bahwa Jepang sebagai negara militeris, memerangi kesalahpahaman tentang budaya Jepang hingga sentimen anti-Jepang yang berlaku di dunia. Saat ini,

Jepang terus memperkenalkan citranya yang baik dan ramah melalui perluasan inisiatif diplomasi budayanya ke arah yang baru, dengan fokus pada nilai-nilai dan kebijakan khas Jepang seperti konsep *wa* (keharmonisan), *omotenashi* (keramahan), *omoiyari* (pertimbangan), dan elemen budaya tertentu lainnya. Jepang telah melakukan pendekatan *soft public diplomacy*, yang dalam penelitian ini dicirikan sebagai “*kind diplomacy*”, berbeda dengan China dan Rusia dengan kebijakan budaya “*sharp power*” mereka.

Nadejda berargumen bahwa pada saat yang sama, terdapat poin dan batasan tertentu yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi *kind diplomacy* Jepang di masa depan. Meskipun beragam kegiatan dan strategi promosi budaya telah dilakukan dalam mewujudkan dan menyoroti sifat diplomasi budaya Jepang yang baik dan lembut, kebijakan *kind diplomacy* ini belum diaktualisasikan oleh pemerintah. Sebaliknya, lebih ditekankan pada citra Jepang sebagai negara yang keren melalui inisiatif *Cool Japan*. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan memperkaya kehadiran budayanya di luar negeri, Jepang harus mempertimbangkan kembali fokus diplomasi budayanya.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ekaterina Goncharova dengan judul yang dipublikasi oleh *Tallinn University of Technology* pada tahun 2018 (Goncharova, 2018). Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi instrumen dan mekanisme kerja yang efektif dalam diplomasi budaya serta dampaknya di tingkat internasional dengan menggunakan Jepang sebagai contohnya. Untuk itu peneliti melakukan penentuan karakteristik utama dari kebijakan budaya di Jepang, serta mengidentifikasi aspek partisipasi Jepang mana yang efektif dalam mode monolog, dialog, dan kolaborasi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder.

Diplomasi budaya telah dianggap sebagai salah satu sumber terpenting bagi Jepang untuk melindungi kepentingannya di negara lain. Untuk mempromosikan citra nasional Jepang di luar negeri, dengan kata lain untuk meningkatkan *soft power*, elit politik Jepang menggunakan alat yang berbeda dalam diplomasi budayanya. Goncharova menemukan bahwa spesialisasi Jepang adalah kecenderungannya dalam berfokus pada generasi muda. Secara monolog, Jepang

menyebarkan nilai-nilainya melalui budaya populer, yang diterima secara positif oleh anak-anak muda dunia internasional. Di sisi terkait dialog maupun melalui model kolaborasi, pemerintah Jepang berupaya secara signifikan dalam program pendidikan dan pertukaran yang ditujukan untuk generasi muda yang terampil, menciptakan lingkungan di mana pelajar dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang Jepang, dan bahkan menarik mereka untuk datang ke Jepang.

Goncharova yakin bahwa Spesialisasi tersebut tentunya mempengaruhi seberapa efektif metode kerja diplomasi budaya dalam politik luar negeri. Jika monolog, dialog, dan kolaborasi dipersepsikan sebagai mode, dapat dikatakan efektivitas diplomasi budaya bergantung pada seberapa besar pengaruh masing-masing mode. Perlu dicatat bahwa tidak semua mode selalu efektif dalam hal pemenuhan tujuannya. Efektivitas diplomasi budaya Jepang secara umum adalah cara pengorganisasiannya, di mana pemerintah menciptakan kerangka kerja struktural untuk pertukaran dan arus informasi, sementara lembaga pemerintah dan aktor lainnya lainnya mengimplementasikan proyek-proyek tersebut.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Narroway dengan judul yang dipublikasi oleh *The Japan Foundation*, Sydney pada tahun 2008 (Narroway, 2008). Penelitian pada artikel ini bertujuan untuk menyelidiki konstruksi, proyeksi, dan signifikansi citra samurai dalam konteks khusus Jepang masa perang, dan dengan demikian menjelaskan fungsi simbol sebagai alat ideologi negara. Artikel ini berfokus pada pembahasan tentang samurai sebagai salah satu dari sekian banyak simbol yang dibangun dan digunakan oleh negara Jepang untuk mempromosikan ideologi nasionalistik antara periode Meiji dan akhir Perang Pasifik. Kombinasi faktor kontekstual dan fleksibilitas fungsional gambar menjadikan samurai sebagai pilihan terbaik Jepang, dan merupakan simbol nasionalistik yang ideal untuk digunakan karena memenuhi semua persyaratan ideologi resmi. Dalam citra samurai, negara mampu memadukan konsep keunikan bangsa, kekuatan militer, dan kebajikan moral. Namun, peneliti menemukan ketidaksesuaian antara ideologi tersebut dalam kehidupan nyata yang terjadi dalam masyarakat Jepang. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data *sekunder*.

Narroway menemukan bahwa dalam berbagai media termasuk teks, sumber bergambar, baik foto maupun ilustrasi dan film, kata, gambar, ide serta nilai digunakan untuk menggambarkan lalu digunakan sehubungan dengan samurai dalam retorika ideologis resmi. Gambar samurai tertentu dibangun, digunakan, dan dimanipulasi dalam dokumen resmi, media kontemporer, dan materi nasionalistik yang ditulis secara independen, menghadirkan wacana ideologis kepada penduduk Jepang di berbagai tingkatan. Dalam mengimplementasikan sumber-sumber *primer* tersebut, yang dilakukan oleh pemerintah, institusi nasional seperti militer dan sistem pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi sosial dan media, secara sistematis membangun dan memproyeksikan citra samurai sebagai prajurit heroik. Kental dengan tradisi (*the way of the samurai*) sebuah tradisi (nilai-nilai kesetiaan, ketaatan dan pengorbanan diri) yang sengaja diubah dari kode elit untuk diterapkan ke seluruh bangsa.

Narroway menunjukkan bahwa sifat simbol tersebut membatasi keefektifannya sebagai alat mobilisasi. Berbeda dengan citra yang diusung oleh negara, Jepang tidak pernah menjadi bangsa samurai. Ideologi nasionalis mendominasi wacana publik karena upaya negara yang luas, baik dalam hal melembagakan indoktrinasi ideologi dan penyensoran, sehingga simbol samurai yang diidealkan berhasil merasuki masyarakat Jepang di semua lapisan. Namun, demikian, pemisahan antara citra yang dipromosikan dalam retorika resmi dan tekanan dan tuntutan yang diberikan pada penduduk masa perang, citra samurai pada akhirnya tidak dapat lagi mendukung tujuan indoktrinasi negara. samurai yang diidealkan tidak pernah lebih dari sebuah citra yang dibangun di atas fondasi yang tidak memiliki resonansi populer yang nyata, sehingga membuat banyak orang mempertanyakan dan tidak mempercayai cita-cita pejuang nasionalis.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Armon Fouladi dengan Judul yang dipublikasi *Temple University Press* pada tahun 2018 (Fouladi, 2018). Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari era Kamakura Bakufu (1185-1333), samurai, dan *bushido* terhadap hubungan internasional Jepang khususnya dalam bidang diplomasi. Oleh karenanya, peneliti memulai dengan membahas sejarah berdirinya pemerintahan Kamakura Bakufu yang dipimpin oleh Minamoto

Yoritomo. Fouladi menemukan bahwa era pemerintah pertama Jepang (*Shogun*) inilah yang melahirkan samurai (dan *bushido*) sistem pemerintahan tersebut.

Fouladi menjelaskan bahwa Jepang merupakan komponen utama untuk memahami tatanan internasional di Asia. Tindakan Jepang dari akhir 1800-an hingga pertengahan 1900-an mendefinisikan wilayah tersebut, serta dampaknya masih berlangsung hingga saat ini. Baik Kamakura Bakufu, samurai, dan *bushido* memiliki dampak penting pada hubungan internasional Jepang. Pada tahun 1905, peneliti terkenal Dr. Inazo Nitobe ingin menjelaskan *bushido* sebagai “sila ksatria” Jepang. Nitobe menjadikan semangat dari samurai ini sebagai kode kesatrian Jepang, dan menggunakannya untuk menegaskan bahwa Jepang sejajar dengan Amerika dan negara-negara Eropa. Hal ini juga dibuktikan ketika Jepang mengirim pasukan membantu pendudukan Amerika di Irak, yang disebut sebagai tentara “*the samurai of Japan, the nation of bushido*”, pada tahun 2006.

Pandangan ini kembali bangkit dalam situasi internasional saat ini, mengingat sikap Konservatif Jepang pada beberapa tahun terakhir. Jepang melakukan beberapa upaya untuk mendorong remiliterisasi dan penghapusan Pasal 9. Semua ini mengingatkan kembali pada Zaman Kamakura, yang membantu membentuk banyak cita-cita dan prinsip *bushido*, yang mencirikan situasi saat ini. Tindakan Bakufu, dan pendirinya Minamoto Yoritomo, memiliki dampak definitif pada citra samurai dan *bushido*. Dengan samurai dan *bushido* sebagai komponen penting dari pola pikir Jepang, penting untuk memahami tindakan dan pengaruh dalam penciptaannya, sehingga kita dapat memahami tindakan yang diambil oleh Jepang.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Koichi Iwabuchi dengan judul yang dipublikasi oleh International Journal of Cultural Diplomacy pada tahun 2015. Penelitian pada artikel ini bertujuan untuk menyelidiki secara kritis mengenai kemajuan dari diplomasi budaya Jepang yang baru ini dengan menempatkannya dalam konteks yang lebih luas dari munculnya perhatian kebijakan terhadap penggunaan budaya media yang telah didorong oleh penerapan kekuatan lunak dan pencitraan negara secara global. Akan dikemukakan bahwa meskipun penekanannya pada promosi pertukaran dan dialog budaya internasional, diplomasi

budaya populer Jepang tidak lebih dari sekadar proyeksi satu arah budaya Jepang. Sementara pengenalan budaya media Jepang memfasilitasi beberapa pemahaman tentang Jepang dan pertukaran antar budaya, diplomasi budaya populer tidak secara serius terlibat dengan promosi dialog lintas batas atas isu-isu yang terbentuk secara historis di Asia Timur. Menggambarkan betapa pentingnya untuk menganggap serius implikasi domestik dari diplomasi budaya, terutama jika tujuannya adalah untuk mempromosikan pertukaran budaya dengan cara yang lebih kosmopolitan dan melampaui penguatan yang tidak kritis dari pemahaman yang homogen dan eksklusif tentang budaya nasional. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder.

Iwabuchi, mendapati tanda-tanda yang menjanjikan bahwa arus media dan budaya trans-Asia memfasilitasi saling pengertian dan interaksi yang dimediasi di tingkat akar rumput. Namun, jika potensi penuh mereka ingin dieksploitasi, diplomasi budaya populer harus memperluas aspirasinya. Misalnya, diplomasi budaya populer harus mengembangkan desain pedagogis yang memanfaatkan budaya media dengan lebih baik untuk memajukan hubungan transnasional dengan cara yang mendorong percakapan internasional yang merefleksikan diri tentang antagonisme yang berkembang atas isu-isu historis dan meningkatkan pemahaman antar budaya tentang keragaman budaya dalam setiap masyarakat. Kemudian, menyoroti kebutuhan untuk berinteraksi dengan publik internal maupun eksternal. Untuk memajukan dialog lintas batas, diplomasi budaya tidak boleh hanya terlibat dalam promosi pertukaran antar masyarakat dan saling pengertian, tetapi juga pengembangan ‘diplomasi budaya domestik’ yang mendorong masyarakat nasional untuk belajar tentang dan mendengarkan orang lain daripada hanya memproyeksikan gagasan tentang dirinya sendiri.

Iwabuchi menjelaskan bahwa dalam mempelajari tentang orang lain tidak boleh didasarkan pada konsepsi dikotomis tentang ‘kita’ dan ‘mereka’. Hal itu harus melampaui kerangka kerja yang telah ditetapkan sebelumnya tentang mengetahui tentang ‘kita’ dan ‘mereka’ untuk secara reflektif memikirkan kembali mengapa dan bagaimana ‘kita’ telah dipersepsikan dengan cara tertentu yang tidak merangkul ‘mereka’ sebagai bagian dari ‘kita’. Dialog lintas batas menjelaskan apa yang masih

belum diketahui tentang ‘kita’ dan juga tentang ‘mereka’ dalam hal narasi sejarah dan komposisi bangsa yang beragam. Memberikan perhatian kritis terhadap diplomasi budaya domestik mempersoalkan konstruksi eksklusif bangsa. Ini bukan untuk menolak relevansi diplomasi budaya dalam melayani kepentingan nasional. Namun, cakupan kepentingan nasional perlu diperluas, melampaui pengejaran tujuan ekonomi dan politik yang difokuskan secara sempit, memajukan pertukaran budaya dengan cara yang lebih terbuka, dialogis, dan kosmopolitan untuk mengatasi berbagai masalah dunia yang mengglobal seperti aliran dan koneksi budaya yang kompleks, hubungan internasional yang terbentuk secara historis, dan keragaman budaya yang berkembang di dalam batas-batas negara.

Tabel 1. Komparasi Penelitian Terdahulu

peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Konsep/ Teori	Kesimpulan
Nadejda Gadjeva	<i>Japan's "Kind Diplomacy": Conceptualizing Japanese Foreign Cultural Policies (2022)</i>	kualitatif	Diplomasi Budaya	Pergeseran fitur-fitur khusus diplomasi budaya Jepang dari masa perang ke masa pasca perang, dimana kemudian Jepang menggunakan konsep <i>wa</i> (keharmonisan), <i>omotenashi</i> (keramahan), <i>omoiyari</i> (pertimbangan), dan elemen budaya tertentu lainnya yang dicirikan sebagai “ <i>kind diplomacy</i> ”
Lisa Narroway	<i>Symbols of State Ideology: The samurai in Modern Japan (2008)</i>	kualitatif	samurai Budaya	Pemerintah, institusi nasional seperti militer dan sistem pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi sosial dan media, secara sistematis membangun dan memproyeksikan citra samurai sebagai prajurit heroik. Kental dengan tradisi ( <i>the way of the samurai</i> ) sebuah tradisi (nilai-nilai kesetiaan, ketaatan dan pengorbanan diri) yang sengaja diubah dari kode elit untuk diterapkan ke seluruh

				bangsa.
Ekaterina Goncharova	<i>Cultural Diplomacy Of Japan (2018)</i>	kualitatif	Diplomasi Budaya	Spesialisasi diplomasi budaya Jepang adalah kecenderungannya dalam berfokus pada generasi muda. Secara monolog, Jepang menyebarkan nilai-nilainya melalui budaya populer, yang diterima secara positif oleh anak-anak muda dunia internasional. Di sisi terkait dialog maupun melalui model kolaborasi, pemerintah Jepang berupaya secara signifikan dalam program pendidikan dan pertukaran yang ditujukan untuk generasi muda yang terampil, menciptakan lingkungan di mana pelajar dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang Jepang, dan bahkan menarik mereka untuk datang ke Jepang.
Armon Fouladi	<i>The Spirit of the samurai: The Kamakura Bafuku, the rise of the Bushido, and their role in diplomacy (2018)</i>	kualitatif	samurai Diplomasi	Kamakura Bafuku, samurai, dan <i>bushido</i> memiliki dampak penting pada hubungan internasional Jepang. Pandangan ini kembali bangkit dalam situasi internasional saat ini. Dengan samurai dan <i>bushido</i> sebagai komponen dari pola pikir Jepang, Penting untuk memahami tindakan dan pengaruh dalam penciptaannya, sehingga kita dapat memahami tindakan yang diambil oleh Jepang.

Koichi Iwabuchi	<i>Pop-culture diplomacy in Japan: soft power, nation branding and the question of 'international cultural exchange'</i> (2015)	kualitatif	Diplomasi Budaya Budaya Populer	Dalam eksploitasi potensi penuh diplomasi budaya, harus memajukan dialog lintas batas, diplomasi budaya tidak boleh hanya terlibat dalam promosi pertukaran antar masyarakat dan saling pengertian, tetapi juga pengembangan 'diplomasi budaya domestik' yang mendorong masyarakat nasional untuk belajar tentang dan mendengarkan orang lain daripada hanya memproyeksikan gagasan tentang dirinya sendiri.
-----------------	---	------------	------------------------------------	--

Sumber : Diolah oleh peneliti untuk keperluan penelitian

Kelima artikel tersebut digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini karena memiliki kesamaan dalam subjek, konsep, maupun fokus utama yang dikaji, yaitu diplomasi budaya, samurai, dan Jepang. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah pembeda yang melengkapi kelima acuan tersebut. Pertama, penelitian ini secara eksplisit menggunakan konsep diplomasi budaya Simon Mark untuk mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam instrumen diplomasi budaya, kemudian memetakan kegiatan budaya Jepang ke dalam masing-masing instrumen tersebut. Kedua, penelitian ini menelusuri keterkaitan antara kebudayaan samurai dan kegiatan budaya yang ditampilkan, dengan kriteria koneksi yang ditetapkan secara eksplisit, yaitu koneksi asal-usul, patronase, dan pelekatan nilai. Ketiga, penelitian ini mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kegiatan budaya sebagai sarana Jepang memproyeksikan citra positifnya. Selain ketiga hal tersebut, penelitian ini membatasi kajian pada rentang masa jabatan Perdana Menteri Shinzo Abe (2012–2021), sehingga memiliki fokus periodisasi yang berbeda dari kelima artikel acuan.

## 2.2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual penelitian ini terdiri atas tiga konsep yang membentuk satu rantai penjelasan. Diplomasi budaya menjelaskan alat yang digunakan Jepang, *soft power* menjelaskan tujuan yang ingin dicapai melalui alat tersebut, dan

transformasi serta selektivitas nilai menjelaskan mekanisme yang memungkinkan kebudayaan samurai berubah fungsi dari simbol militeristik menjadi instrumen diplomasi yang positif. Ketiganya digunakan secara bersama-sama untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

### 2.2.1. Diplomasi Budaya

Diplomasi budaya menurut Simon Mark diartikan sebagai penggunaan/penerapan budaya yang dilakukan negara sebagai pendukung tujuan diplomasi serta kebijakan luar negeri, dengan menggunakan antara komunikasi pemerintah kepada khalayak asing dalam rangka untuk memberikan pengaruh positif negara kepada khalayak asing (Mark, 2009). Dalam menghadirkan citra nasional di luar negeri, diplomasi budaya dapat menjadi solusi dari kecurigaan audiens terhadap pesan-pesan resmi, lalu juga berfungsi untuk memberikan substansi pada reputasi nasional. Adapun di dalam negeri, dapat berkontribusi pada kohesi sosial nasional, terutama ketika ditargetkan pada kelompok etnis minoritas. Penelitian ini menggunakan penjelasan diplomasi budaya menurutnya sebagai kerangka utama karena Simon Mark adalah ahli yang secara eksplisit mengkategorikan instrumen-instrumen spesifik dari diplomasi budaya. Simon menilai dalam upaya untuk mencapai potensi penuh dari diplomasi budaya, praktiknya perlu dipahami dengan lebih baik, terutama kontribusinya terhadap citra nasional, branding, dan kohesi sosial (Mark, 2009). Untuk itu, dalam jurnal yang berjudul *A Greater Role for Cultural Diplomacy*, Simon menjelaskan definisi, elemen-elemen utama dari diplomasi budaya, serta beragam praktiknya sehingga diplomasi budaya dapat mencapai potensi sepenuhnya.

Peneliti membagi penjelasan landasan konsep ini ke dalam tiga poin, yaitu definisi, berisi uraian dari beberapa ahli yang dianggap tepat untuk mendukung dua poin setelahnya. Lalu berdasarkan definisi tersebut, peneliti memaparkan berbagai aspek utama yang termasuk dalam bentuk praktik diplomasi budaya. Terakhir mengenai potensi diplomasi budaya, membahas pengaruhnya terhadap negara pelaku di dalam penelitian ini.

Pertama, Simon mengambil definisi diplomasi budaya menurut Kementerian Kebudayaan dan Warisan Selandia Baru, presentasi internasional kegiatan budaya oleh suatu negara untuk meningkatkan pemahaman tentang kehidupan budayanya dan menciptakan citra yang baik dalam rangka memfasilitasi peningkatan hubungan diplomatik dan perdagangan (Ministry for Culture Heritage, 2000); Kemudian definisi oleh Milton Cummings yang mengartikan diplomasi budaya sebagai pertukaran ide, informasi, seni dan aspek budaya lainnya di antara negara-negara dan masyarakatnya dalam rangka mendorong saling pengertian' yang 'juga bisa terjadi secara satu arah jika tidak pertukaran dua arah, seperti ketika satu negara memfokuskan upayanya untuk mempromosikan bahasa nasional, menjelaskan kebijakan dan sudut pandangnya, atau "menceritakan kisahnya" ke seluruh dunia (Cummings, 2003).

Kedua, Diplomasi budaya mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh, atau melibatkan, berbagai macam partisipan seperti seniman dan penyanyi, bersama dengan perwujudan dari kesenian mereka seperti film dan teater, mempromosikan aspek budaya suatu negara misalnya bahasa, dan pertukaran antar manusia, seperti akademisi. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam lingkup diplomasi budaya menunjukkan aspek budaya negara yang diwakili oleh pemerintah. memiliki jangkauan kegiatan yang luas, tidak lagi terbatas pada budaya tinggi, yang hanya diproduksi untuk kaum elit. Sekarang kegiatan ini lebih sering mencakup kegiatan budaya yang cenderung ditujukan pada masyarakat luas. Instrumen dari lingkup diplomasi budaya yang lebih luas ini meliputi pertunjukan kelompok budaya (termasuk festival), acara olahraga, kuliner, serta pertunjukan dan pameran seniman (Mark, 2009). Dalam penelitian ini, festival diperlakukan sebagai bagian dari instrumen pertunjukan kelompok budaya, sehingga analisis menggunakan empat kategori instrumen secara operasional.

Luasnya lingkup diplomasi budaya menghasilkan manfaat yang luas pula, seperti mencakup memajukan kepentingan perdagangan, politik,

diplomatik, dan ekonomi, mengembangkan hubungan bilateral secara menyeluruh, termasuk elemen ekonomi, perdagangan, politik, budaya, dan diplomatik, berhubungan dengan kelompok-kelompok di luar negeri yang penting bagi praktisi diplomasi budaya, dan membantu menjaga hubungan bilateral di saat-saat ketegangan. Diplomasi budaya yang dipraktikkan oleh entitas resmi biasanya mencerminkan kebijakan resmi dan menampilkan citra negara yang memenuhi tujuan kebijakan pemerintah menekankan hal-hal positif. Politisi selalu menganggap diplomasi budaya paling efektif ketika menunjukkan aspek positif suatu negara. Mereka dan masyarakat luas senang melihat pencapaian budaya terbaik suatu negara ditampilkan di luar negeri.

Ketiga, diplomasi budaya memiliki potensi untuk berkontribusi lebih efektif terhadap tujuan kebijakan luar negeri, diplomasi, dan tujuan domestik pemerintah. Untuk mencapai potensi sepenuhnya, diplomasi budaya akan lebih baik jika didampingi bersama dengan pemahaman atas posisinya dalam pencitraan negara. Citra negara adalah cara efektif untuk merangkum tujuan bersama mendasar suatu negara, dan dengan demikian berupaya mencapai momentum maju dan perilaku bersama yang efektif. Citra negara harus melibatkan rencana yang menetapkan bagaimana suatu negara dapat memposisikan dirinya di dunia, dan kebijakan, inovasi, serta investasi yang perlu dilakukan negara tersebut untuk mendapatkan citra yang diinginkannya (Mark, 2009).

Diplomasi budaya menghasilkan kepatuhan nasional domestik terhadap citra negara di luar negeri, suatu negara menjadi seperti yang diklaimnya, karena ingin memastikan bahwa citranya didasarkan pada fakta, bukan ilusi. Negara tersebut ingin layak mendapatkan reputasinya. Memastikan keselarasan yang baik antara diplomasi budaya dan pencitraan negara membutuhkan kerjasama dan koordinasi dari berbagai sektor seperti, pariwisata, bisnis, investasi, diplomasi publik (Mark, 2009). Diplomasi budaya harus bisa menampilkan jenis aktivitas budaya terbaik dari masyarakatnya. Menunjukkan sebuah negara dengan segala kecemerlangan,

vitalitas, dan kegilaannya. Hal ini harus mencakup budaya yang politis dan provokatif (Mark, 2009). Hal ini pada gilirannya akan menunjukkan bahwa suatu negara cukup percaya diri untuk menunjukkan dirinya apa adanya. Alih-alih menolak penggunaan budaya asli, karena budaya tersebut mungkin terlihat kuno dan kurang canggih, budaya masyarakat adat harus dirayakan dan menjadi elemen penting dalam program diplomasi budaya yang seimbang.

### 2.2.2 Soft Power

Konsep diplomasi budaya tidak dapat dipahami secara terpisah dari konsep *soft power* yang dikemukakan oleh Joseph Nye, karena diplomasi budaya pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama dalam pengerahan *soft power* suatu negara. Nye membedakan kekuatan suatu negara ke dalam dua bentuk, yaitu *hard power* yang bersandar pada paksaan melalui kekuatan militer dan ekonomi, dan *soft power* yang bersandar pada daya tarik (*attraction*) sehingga negara lain menginginkan apa yang diinginkan negara pemilik daya tarik tersebut tanpa perlu paksaan (Nye, 2004). Menurut Nye, *soft power* suatu negara bersumber dari tiga hal, yaitu budayanya, nilai-nilai politiknya, dan kebijakan luar negerinya, sepanjang ketiganya dipandang sah dan menarik oleh pihak lain.

Dalam kerangka penelitian ini, *soft power* berfungsi sebagai konsep payung yang menjelaskan tujuan di balik praktik diplomasi budaya Jepang. Jika diplomasi budaya menurut Mark (2009) adalah alat, maka *soft power* adalah hasil yang ingin dicapai melalui alat tersebut, yaitu perbaikan citra dan peningkatan daya tarik Jepang di mata masyarakat internasional. Nye sendiri secara khusus menempatkan Jepang sebagai negara dengan salah satu sumber daya *soft power* terbesar di dunia, terutama melalui penyebaran budaya dan tradisi nasionalnya (Nye, 2004). Konsep ini digunakan dalam penelitian untuk memahami mengapa Jepang, yang dibebani citra militeristik dari masa lalunya, memilih jalur daya tarik budaya alih-alih kekuatan militer untuk memperbaiki posisinya dalam tatanan internasional.

### 2.2.3 Transformasi dan Selektivitas Nilai Budaya

Selain diplomasi budaya dan *soft power*, penelitian ini memerlukan kerangka untuk menjelaskan persoalan yang menjadi inti analisisnya, yaitu bagaimana sebuah warisan budaya yang berakar pada tradisi militeristik dapat ditampilkan sebagai instrumen diplomasi yang damai dan positif. Untuk itu, penelitian menggunakan dua konsep yang saling terkait, yaitu transformasi nilai dan selektivitas nilai.

Landasan pertama bersumber dari konsep *invention of tradition* yang dikemukakan oleh Eric Hobsbawm dan Terence Ranger (1983). Hobsbawm dan Ranger menunjukkan bahwa banyak tradisi yang dianggap berasal dari masa lampau yang jauh sesungguhnya merupakan hasil konstruksi yang relatif baru, yang sengaja dibangun untuk menanamkan nilai dan norma tertentu melalui pengulangan, dan konsep ini secara khusus relevan dengan pembentukan identitas bangsa, nasionalisme, serta simbol-simbol nasional. Perlu ditegaskan bahwa Hobsbawm dan Ranger memosisikan diri secara kritis terhadap fenomena ini, dan konsep autentisitas dalam kerangka mereka justru dipertanyakan. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan bukan untuk menyatakan bahwa kebudayaan samurai bersifat autentik secara mutlak, melainkan untuk memahami bahwa apa yang ditampilkan suatu negara sebagai warisan tradisional selalu melibatkan proses pemilihan dan pembentukan ulang terhadap masa lalunya.

Atas dasar itu, penelitian membedakan dua mekanisme. Transformasi nilai merujuk pada proses historis di mana sebuah praktik budaya mempertahankan inti nilainya namun melepaskan konteks asal yang melingkupinya, sebagaimana tampak dalam pergeseran seni bela diri Jepang dari *bujutsu* yang berorientasi tempur menjadi *budo* yang berorientasi pengembangan diri (Andressen, 2002). Dalam penelitian ini, transformasi *bujutsu* menjadi *budo* diposisikan sebagai model paradigmatis yang berlaku tidak hanya pada seni bela diri, tetapi juga pada keseluruhan kebudayaan yang berkoneksi dengan kelas samurai. Sementara itu, selektivitas nilai

merujuk pada praktik suatu negara dalam memilih untuk menampilkan aspek-aspek bernilai positif dari warisan budayanya sambil tidak menonjolkan aspek-aspek yang berkonotasi negatif, sejalan dengan prinsip Mark (2009) bahwa diplomasi budaya dinilai paling efektif oleh para pembuat kebijakan ketika menampilkan aspek positif suatu negara. Penting untuk ditegaskan bahwa ketiga konsep ini, baik transformasi nilai maupun selektivitas nilai, digunakan sebagai kerangka tafsir peneliti terhadap data, dan bukan sebagai klaim mengenai niat sadar para pembuat kebijakan Jepang. Dengan kerangka ini, penelitian dapat menjelaskan mekanisme yang menghubungkan kebudayaan samurai yang secara historis militeristik dengan fungsinya sebagai instrumen diplomasi budaya pada masa pemerintahan Shinzo Abe, sekaligus mempertahankan kewaspadaan kritis bahwa proses tersebut melibatkan seleksi dan pembentukan ulang terhadap warisan masa lalu.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran yang digunakan peneliti untuk membangun pola pikir yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu memvisualisasikan perjalanan kebudayaan samurai dari posisinya sebagai simbol militer pada masa feodal hingga menjadi instrumen diplomasi budaya Jepang pada masa pascaperang. Peneliti berangkat dari kenyataan bahwa samurai memiliki dua wajah yang tampak bertentangan, yaitu wajah militeristik yang melahirkan citra kelam serta wajah kultural sebagai pencipta dan pelindung berbagai bentuk kebudayaan. Kedua wajah ini disatukan melalui sebuah proses transformasi nilai yang terjadi selama era Edo, ketika seni bela diri samurai bergeser dari *bujutsu* yang berorientasi pada pengalahan musuh menjadi *budo* yang berorientasi pada pengembangan diri, sebuah pergeseran yang mempertahankan inti nilai kedisiplinan, kehormatan, dan spiritualitas sambil melepaskan konteks kekerasannya.

Atas dasar transformasi tersebut, kerangka ini kemudian menempatkan kebutuhan Jepang untuk memperbaiki citra militeristiknya melalui diplomasi budaya sebagai *soft power*, dengan masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo

Abe (2012 sampai 2021) sebagai konteks utama. Pada tahap ini peneliti menunjukkan strategi yang ditempuh Jepang, yaitu selektivitas nilai dan penggunaan kebudayaan samurai tanpa pernah menyebut kata "samurai" dalam dokumen resmi. Strategi tersebut diwujudkan melalui empat instrumen diplomasi budaya menurut Simon Mark, yang masing-masing diisi oleh kebudayaan samurai, lalu memancarkan tujuh nilai inti yang ditujukan untuk membentuk citra positif Jepang lintas budaya. Keseluruhan alur pemikiran ini divisualisasikan dalam bagan berikut.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah peneliti untuk keperluan penelitian

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis isi kualitatif terarah (*directed qualitative content analysis*). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan budaya yang digunakan Jepang sebagai instrumen diplomasi, bukan mengukur frekuensi atau menguji hubungan antarvariabel secara statistik.. Bryman (2012) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif secara umum bersifat induktif dalam hubungan antara teori dan data. Penelitian ini berbeda dari kecenderungan umum tersebut karena hubungan antara teori dan data bersifat deduktif, sebab kategori analisis telah ditetapkan sejak awal dari kerangka empat instrumen diplomasi budaya Simon Mark (2009). Inilah ciri analisis isi kualitatif terarah, yang menempatkan kategorisasi dan penelusuran data di dalam kategori serta kriteria yang telah ditentukan, bukan membangun kategori dari data secara induktif.

Dengan demikian, kegiatan analisis dalam penelitian ini bukan operasi bebas, melainkan langkah yang dibatasi dan dipertanggungjawabkan melalui dua perangkat eksplisit, yaitu kategori instrumen Mark dan kriteria koneksi historis ke kelas samurai. Analisis bekerja ketika peneliti menetapkan keterkaitan tiap kebudayaan dengan kelas samurai berdasarkan kriteria tersebut, dan ketika mengekstraksi nilai dari karakteristik tiap kebudayaan, sebagaimana diterapkan secara konsisten pada tahap analisis. Oleh karena itu, label yang tepat bagi penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis isi terarah yang bersifat deduktif-dominan, sehingga terdapat kesesuaian antara jenis penelitian yang dinyatakan dan analisis yang sesungguhnya dilakukan.

Pemilihan analisis isi terarah didasarkan pada satu pertimbangan utama. Hsieh dan Shannon membedakan tiga pendekatan analisis isi, yaitu konvensional, terarah, dan sumatif, di mana analisis isi terarah digunakan ketika peneliti telah memiliki teori atau kerangka konseptual awal yang memandu identifikasi kategori sebelum proses analisis dimulai (Hsieh & Shannon, 2005). Penelitian ini memenuhi kondisi tersebut karena konsep diplomasi budaya Simon Mark (2009) telah menyediakan kategori instrumen yang bersifat *a priori*, sehingga analisis bergerak secara deduktif dari kerangka teori menuju data, sembari tetap membuka ruang bagi munculnya kode nilai baru secara induktif di dalam kerangka tersebut.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah penggunaan kebudayaan samurai sebagai instrumen diplomasi budaya Jepang pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe (2012 sampai 2021). Penelitian memusatkan perhatian pada dua hal, yaitu identifikasi kegiatan budaya yang menjadi instrumen diplomasi budaya beserta keterkaitannya dengan tradisi samurai, dan ekstraksi nilai-nilai kebudayaan samurai yang diproyeksikan melalui instrumen tersebut. Penting untuk menetapkan batas fokus secara jujur sejak awal. Penelitian ini mengkaji sisi aktor, yaitu apa yang ditampilkan pemerintah Jepang dan nilai apa yang diproyeksikan melalui pilihan kebudayaan tersebut. Penelitian ini tidak mengukur penerimaan, dampak, atau efektivitas instrumen diplomasi pada audiens negara penerima, karena pengukuran semacam itu membutuhkan data resepsi yang berada di luar jangkauan sumber dokumen resmi Jepang. Dengan demikian, setiap pembahasan mengenai daya jangkau atau resonansi nilai dipahami sebagai intensi strategis dan proyeksi yang dapat dibaca dari pilihan kebijakan Jepang, bukan sebagai klaim atas keberhasilan yang telah terbukti secara empiris di pihak penerima. Rentang waktu pemerintahan Shinzo Abe dipilih karena pada masa ini promosi budaya menjadi bagian integral kebijakan pemerintah melalui inisiatif seperti Cool Japan, Cool Japan Fund, dan *WA Project*, sehingga periode tersebut menyediakan konsentrasi data kebijakan budaya yang memadai untuk dianalisis.

### 3.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Bell dan Bryman menjelaskan bahwa dokumen resmi negara, dokumen organisasi, publikasi ilmiah, jurnal, laporan, serta sumber daring merupakan jenis dokumen yang dapat diterima sebagai data penelitian sepanjang memenuhi kriteria kualitas dokumen, yaitu keaslian, kredibilitas, keterwakilan, dan kejelasan makna (Bell & Bryman, 2019). Mengikuti landasan tersebut, penelitian ini menempatkan *Diplomatic Bluebook* terbitan Kementerian Luar Negeri Jepang (*Ministry of Foreign Affairs of Japan*, MOFA) sebagai sumber data primer dalam penelitian, karena dokumen ini merupakan laporan tahunan resmi negara mengenai kebijakan luar negeri Jepang. Sumber data pendukung mencakup dokumen dan publikasi dari lembaga pemerintah serta organisasi resmi Jepang, yaitu *Japan Foundation*, *Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology* (MEXT), *Ministry of Economy, Trade and Industry* (METI), dan *Agency for Cultural Affairs* (*Bunka-chō*). Sumber pendukung lainnya berupa artikel daring seperti *Japan Times* dan *Web Japan*, serta publikasi akademik yang diakses melalui basis data ilmiah. Sumber pendukung digunakan untuk dua keperluan, yaitu melengkapi konteks historis kebudayaan samurai yang tidak dijelaskan dalam *Bluebook*, dan menelusuri akar historis tiap bentuk kebudayaan ke dalam tradisi samurai.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Untuk menjaga objektivitas dan menghindari pemilihan data yang hanya menguatkan kesimpulan yang diinginkan, penelitian ini menelaah seluruh edisi *Diplomatic Bluebook* sepanjang rentang 2012 sampai 2021 secara menyeluruh, bukan hanya tahun-tahun tertentu. Penentuan tahun mana yang akhirnya memuat data relevan merupakan hasil temuan dari penelusuran menyeluruh tersebut, bukan kriteria awal pemilihan sampel.

Penelusuran dilakukan dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan secara eksplisit. Dari segi jenis kegiatan, penelitian ini memasukkan kegiatan budaya yang diselenggarakan atau didukung pemerintah Jepang sebagai bagian dari

diplomasi budaya, dan mengeluarkan kegiatan ekonomi, politik, atau keamanan yang tidak memuat unsur budaya. Dari segi keterkaitan budaya, kegiatan yang dimasukkan adalah kegiatan yang bentuk budayanya dapat ditelusuri akarnya ke dalam praktik, patronase, atau nilai kelas samurai, sedangkan kegiatan berbasis budaya populer kontemporer tanpa akar samurai, seperti anime dan manga, dikeluarkan dari analisis. Dari segi rentang waktu, penelitian ini hanya memasukkan kegiatan yang tercatat dalam *Diplomatic Bluebook* tahun 2012 sampai 2021 dan mengeluarkan kegiatan yang berada di luar rentang masa jabatan Shinzo Abe. Terakhir, dari segi kejelasan dokumentasi, kegiatan yang dimasukkan adalah kegiatan yang terdokumentasi dengan keterangan tempat, waktu, dan jenis kegiatan yang memadai, sementara penyebutan kegiatan yang tidak dapat diverifikasi rinciannya dikeluarkan dari analisis.

Berdasarkan penerapan kriteria tersebut, ditemukan bahwa kegiatan yang relevan terkonsentrasi pada enam edisi, yaitu tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2020. Tahun-tahun di luar itu ditelaah namun tidak memuat kegiatan yang memenuhi seluruh kriteria, sehingga ketidakhadirannya merupakan hasil seleksi yang transparan, bukan pengabaian. Setiap kegiatan yang memenuhi kriteria kemudian dicatat dan ditelusuri akar historisnya ke dalam tradisi samurai melalui sumber pendukung, sebelum masuk ke tahap analisis.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi kualitatif terarah, yang dioperasionalkan melalui alur analisis Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2018). Perlu ditegaskan bahwa urutan tahapnya adalah reduksi data terlebih dahulu, kemudian penyajian data, dan diakhiri penarikan kesimpulan, sesuai dengan kerangka asli ketiga ahli tersebut.

Konsep diplomasi budaya Simon Mark (2009) berperan sebagai kerangka kategorisasi *a priori*, bukan sebagai teknik analisis yang berdiri sendiri. Mark mengidentifikasi empat instrumen diplomasi budaya, yaitu pertunjukan kelompok budaya, acara olahraga, kuliner, serta pertunjukan dan pameran seniman. Keempat

kategori inilah yang memandu proses pengodean deduktif. Reduksi data, dengan demikian, tidak dilakukan secara bebas, melainkan dipandu oleh kategori instrumen Mark, sehingga setiap kegiatan yang lolos kriteria inklusi dipetakan ke dalam salah satu dari empat instrumen tersebut. Proses analisis dilakukan melalui empat tahap prosedur yang eksplisit sebagai berikut.

Pertama, kategorisasi instrumen secara deduktif. Setiap kegiatan budaya yang telah terkumpul dipetakan ke dalam salah satu dari empat instrumen diplomasi budaya Mark. Tahap ini merupakan penerapan kategori a priori dan menjadi inti dari sifat terarah pada analisis isi yang digunakan. Kedua, penautan historis ke tradisi samurai. Setiap bentuk kebudayaan yang teridentifikasi ditelusuri keterkaitannya dengan kelas samurai. Penautan dinyatakan sah apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu dari tiga kriteria berikut: (a) koneksi asal-usul, yaitu kebudayaan tersebut lahir dari praktik dan kebutuhan kelas samurai; (b) koneksi patronase, yaitu kebudayaan tersebut berkembang dan dilembagakan, termasuk ditransmisikan kepada masyarakat luas, melalui patronase kelas samurai; atau (c) koneksi pelekatan nilai, yaitu kebudayaan tersebut menjadi bagian dari sistem nilai dan identitas yang dilekatkan pada kelas samurai. Penautan yang tidak memenuhi salah satu kriteria ini dikeluarkan dari analisis. Ketiga, ekstraksi nilai melalui pengkodean. Dari deskripsi historis dan karakteristik tiap bentuk budaya, peneliti mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Pengkodean nilai bersifat induktif di dalam kerangka deduktif, artinya kode nilai dibiarkan muncul dari data namun tetap dalam batas relevansinya dengan konsep diplomasi budaya. Sebuah nilai dimasukkan sebagai temuan apabila memenuhi tiga syarat, yaitu didukung oleh sumber sejarah atau akademik yang kredibel, hadir secara konsisten dalam karakteristik bentuk budaya yang bersangkutan, dan selaras dengan prinsip Mark (2009) bahwa diplomasi budaya menampilkan aspek positif suatu bangsa. Keempat, sintesis nilai inti lintas instrumen dan penarikan kesimpulan. Nilai-nilai yang diekstraksi dari seluruh bentuk budaya disintesis untuk menemukan nilai inti yang hadir secara berulang di berbagai instrumen. Tahap ini menghasilkan kesimpulan akhir penelitian dan

diverifikasi dengan menelusuri kembali keterhubungan antara temuan nilai dan data sumbernya.

Memastikan keterhubungan ketiga tahap analitis tersebut, setiap bentuk kebudayaan dikaji melalui kerangka tiga dimensi yang konsisten, yaitu koneksi historis bentuk budaya dengan tradisi samurai, nilai-nilai samurai yang tertanam di dalamnya, dan kesesuaian bentuk budaya tersebut sebagai instrumen diplomasi budaya menurut prinsip Mark. Penggunaan kerangka tiga dimensi yang seragam ini berfungsi menjaga konsistensi analisis dan memungkinkan pembaca menelusuri jejak penalaran dari data menuju kesimpulan. Keterpercayaan penelitian dijaga melalui dua cara. Pertama, kredibilitas sumber, dengan menempatkan dokumen resmi negara sebagai sumber primer yang memenuhi kriteria kualitas dokumen sebagaimana dijelaskan Bell dan Bryman (2019). Kedua, transparansi prosedur atau jejak audit (*audit trail*), yaitu dengan menyatakan secara eksplisit kriteria inklusi dan eksklusi data, kriteria penautan ke samurai, dan syarat penerimaan sebuah nilai sebagai temuan, sehingga seluruh langkah analisis dapat ditelusuri dan diuji ulang. Penelitian ini tidak mengklaim menggunakan triangulasi sumber sebagai dasar validitas, karena seluruh sumber data berasal dari ekosistem informasi pemerintah Jepang yang memiliki sudut pandang institusional yang sama, sehingga tidak memenuhi syarat kemandirian sumber yang dituntut oleh triangulasi (Denzin, 1978; Patton, 1999). Kesadaran atas keterbatasan ini dijelaskan lebih lanjut pada sub-bab berikut.

### **3.6. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dinyatakan secara terbuka agar cakupan kesimpulannya dipahami secara tepat. Pertama, seluruh data bersumber dari dokumen resmi Jepang, sehingga penelitian ini hanya dapat menjelaskan sisi aktor, yaitu apa yang ditampilkan dan nilai apa yang diproyeksikan Jepang, dan tidak dapat membuktikan bagaimana audiens negara penerima menerima atau memaknai instrumen tersebut. Kedua, atribusi bentuk budaya kepada tradisi samurai bersifat inferensial dan didasarkan pada penelusuran historis, sehingga terbuka bagi penjelasan alternatif yang menempatkan akar budaya tersebut pada tradisi istana kekaisaran atau keagamaan. Ketiga, karena

pemerintah Jepang tidak pernah menyebut samurai secara eksplisit dalam dokumen resminya, keterkaitan yang dibangun dalam penelitian ini merupakan hasil inferensi peneliti, bukan pernyataan langsung dari subjek penelitian. Keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi nilai temuan, namun menetapkan batas yang jelas mengenai apa yang dapat dan tidak dapat disimpulkan dari penelitian ini.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Penelitian ini berangkat dari satu pertanyaan, yaitu bagaimana budaya samurai digunakan sebagai instrumen diplomasi budaya Jepang pada masa Perdana Menteri Shinzo Abe (2012–2021). Berdasarkan analisis terhadap enam *Diplomatic Bluebook* Kementerian Luar Negeri Jepang dengan kerangka diplomasi budaya Simon Mark, konsep *soft power* Joseph Nye, serta konsep transformasi dan selektivitas nilai yang dilandaskan pada gagasan *invention of tradition* Hobsbawm dan Ranger, penelitian ini sampai pada sejumlah kesimpulan berikut.

Pertama, menjawab tujuan untuk mendeskripsikan instrumen diplomasi budaya Jepang dan kaitannya dengan kebudayaan samurai, penelitian menemukan bahwa seluruh kegiatan budaya yang tercatat dalam *Diplomatic Bluebook* selama periode tersebut dapat dikategorikan ke dalam empat instrumen diplomasi budaya menurut Mark, yaitu pertunjukan kelompok budaya, acara olahraga, kuliner, serta pertunjukan dan pameran seni. Keempat instrumen ini diisi oleh tujuh bentuk kebudayaan, yaitu Teater *Noh*, Teater *Kagura*, *Budo*, *Washoku*, upacara minum teh, *Kimono*, dan *Ikebana*. Ketujuh memiliki koneksi yang dapat ditelusuri ke kelas samurai, meskipun dengan kadar yang berbeda-beda sesuai tiga kriteria koneksi yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu koneksi asal-usul, koneksi patronase, dan koneksi pelekatan nilai. *Budo* menempati koneksi paling langsung karena lahir dari sistem latihan tempur samurai, sementara *Kagura*, *Washoku*, dan upacara minum teh terhubung terutama melalui patronase dan pelekatan nilai, bukan melalui asal-usul. Temuan ini menegaskan bahwa istilah kebudayaan samurai dalam penelitian ini bukan klaim kepemilikan eksklusif, melainkan kerangka analisis peneliti untuk menelusuri hubungan historis antara kebudayaan yang ditampilkan dan kehidupan kelas prajurit Jepang.

Kedua, menjawab tujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai kebudayaan samurai sebagai instrumen diplomasi budaya, penelitian mengidentifikasi tujuh nilai inti yang secara konsisten direpresentasikan melalui keempat instrumen, yaitu kedisiplinan, keindahan, keanggunan, ketenangan, kehormatan, spiritualitas, dan kepercayaan. Nilai-nilai ini bukan dimensi yang dibuat-buat untuk keperluan diplomasi, melainkan nilai yang telah melalui proses transformasi historis dari konteks militeristik menuju konteks budaya yang damai. Pergeseran seni bela diri dari *bujutsu* yang berorientasi tempur menjadi *budo* yang berorientasi pengembangan diri menjadi model paradigmatik dari proses ini, yaitu pola ketika inti nilai dipertahankan sementara konteks kekerasan dilepaskan, dan pola yang sama dapat ditelusuri pada keenam kebudayaan lainnya. Setiap instrumen memancarkan penekanan nilai yang khas: Teater *Noh* dan *Kagura* menonjolkan spiritualitas dan ketenangan, *Budo* menonjolkan kedisiplinan dan kehormatan, *Washoku* dan upacara minum teh menonjolkan keanggunan dan kepercayaan melalui keramahan, sementara *Kimono* dan *Ikebana* menonjolkan keindahan dan keanggunan sebagai ekspresi estetika yang berakar pada sistem nilai samurai. Ketujuh nilai inti tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan hadir saling melengkapi di seluruh instrumen.

Ketiga, sebagai jawaban menyeluruh atas pertanyaan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Shinzo Abe, Jepang menampilkan kebudayaan yang berkoneksi dengan kelas samurai melalui keempat instrumen diplomasi budaya, dengan pola yang konsisten dalam memilih aspek-aspek bernilai positif dan tidak menonjolkan aspek militeristiknya. Pola selektivitas nilai ini berlangsung tanpa satu pun dokumen resmi yang menyebut kata samurai, sehingga koneksi tersebut bersifat implisit dan menjadi inferensi penelitian, bukan pengakuan eksplisit pemerintah Jepang.. Sejalan dengan konsep *invention of tradition*, apa yang ditampilkan Jepang sebagai warisan terbaiknya harus dipahami sebagai hasil seleksi dan pembentukan ulang terhadap masa lalu, bukan keseluruhan warisan samurai apa adanya. Dengan demikian, yang dapat ditegaskan keotentikannya bukanlah idealisasi citra prajurit samurai sebagaimana dikritik Narroway, melainkan praktik-praktik budaya konkret yang secara faktual dikembangkan dalam ekosistem kehidupan kelas samurai.

Keempat, penelitian ini menegaskan batasannya sendiri. Analisis dilakukan terhadap konten dan strategi diplomasi budaya sebagaimana terekam dalam dokumen pihak pengirim, yaitu Kementerian Luar Negeri Jepang, sehingga penelitian ini tidak dapat menyimpulkan efektivitas maupun penerimaan nilai-nilai tersebut di negara sasaran. Klaim mengenai daya jangkau lintas budaya yang muncul dalam pembahasan berstatus argumen normatif, bukan temuan empiris tentang resepsi audiens, dan sejalan dengan kritik Iwabuchi bahwa diplomasi budaya Jepang cenderung bersifat proyeksi satu arah. Selain itu, kebudayaan samurai perlu dipahami sebagai satu lapis di dalam diplomasi budaya era Abe yang secara umum didominasi oleh konten Cool Japan nonsamurai seperti anime, manga, dan budaya populer, bukan sebagai keseluruhan wajah diplomatik Jepang. Dengan batasan-batasan tersebut, kontribusi penelitian ini terletak pada pengungkapan sebuah pola yang selama ini tidak diberi nama, yaitu bahwa di balik kebudayaan tradisional yang dipromosikan Jepang ke dunia, terdapat warisan kelas samurai yang nilai-nilainya telah ditransformasikan dan diseleksi untuk memproyeksikan citra positif bangsa.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi arah bagi penelitian selanjutnya maupun bagi praktik diplomasi budaya. Mengingat penelitian ini hanya menjelaskan sisi aktor, yaitu apa yang ditampilkan dan nilai apa yang diproyeksikan oleh Jepang, penelitian berikutnya disarankan untuk mengkaji sisi penerima dengan menelusuri bagaimana audiens di negara mitra menerima dan memaknai instrumen kebudayaan samurai, misalnya melalui liputan media negara penerima atau respons resmi pemerintah setempat, sehingga klaim mengenai daya jangkau nilai dapat diuji secara empiris dan tidak berhenti pada tataran intensi. Selain itu, karena atribusi bentuk budaya kepada tradisi samurai dalam penelitian ini bersifat inferensial dan dibangun melalui penelusuran atas dokumen yang tidak pernah menyebut samurai secara eksplisit, penelitian lanjutan dapat memperkuat dasar atribusi tersebut dengan menggunakan sumber primer berbahasa Jepang atau wawancara dengan praktisi budaya dan pejabat diplomatik terkait, sekaligus mempertimbangkan penjelasan alternatif yang

menempatkan akar kebudayaan tersebut pada tradisi istana kekaisaran atau keagamaan. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan di negara berkembang, termasuk Indonesia, bahwa kekayaan budaya tradisional yang memiliki akar historis mendalam dapat diolah secara selektif menjadi instrumen diplomasi budaya yang menonjolkan nilai-nilai positif universal, sepanjang disertai pemahaman yang cermat atas makna dan konteks historis dari setiap unsur budaya yang ditampilkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, S. (2013). *Atarashii kuni-e* [Towards a new country]. Bunshun Bunko.
- Andressen, C. (2002). *A short history of Japan: From samurai to Sony*.
- Arase, D., & Akaha, T. (2010). *The US-Japan alliance: Balancing soft and hard power in East Asia*.
- Asian Art Museum Education Department. (2009). *Arts of the samurai*.
- Bell, E. A., & Bryman, A. (2019). *Social research methods*. Oxford University Press.
- A brief history of sumo. (2023, March 15). Japan Up Close. Retrieved January 23, 2024, from [https://japanupclose.web-japan.org/techculture/c20230315\\_2.html](https://japanupclose.web-japan.org/techculture/c20230315_2.html)
- Bryman, A. (2012). *Social research methods*. Oxford University Press.
- Clammer, J. (2013). *Making tea, making Japan: Cultural nationalism in practice*.
- Cool Japan Fund. (2014). *Cool Japan Fund launched to aid global promotion of Japanese culture*. [https://www.jef.or.jp/journal/pdf/193rd\\_Column04.pdf](https://www.jef.or.jp/journal/pdf/193rd_Column04.pdf)
- Cull, N. J. (2008). *Public diplomacy: Taxonomies and histories*.
- Cummings, M. C. (2003). *Cultural diplomacy and the United States government: A survey*.
- DeCarli, A. M. (2010). *Theatre and cultural diplomacy: The role of the performing arts in how nations deal with each other*.
- Denzin, N. K. (1978). *Triangulation: A case for methodological evaluation and combination*. In *Sociological methods* (pp. 339–357).

- Dinmore, E. G. (2016). In the Noh: Using samurai theater in the history classroom.
- Drixler, F. F., Fleming, W. D., & Wheeler, R. G. G. (2015). Samurai and the culture of Japan's great peace.
- Epova, M. A. (2014). The cultural diplomacy of Japan. *Humanities Scientific Researches*, (2). <http://human.snauka.ru/2014/02/5861>
- Fouladi, A. (2018). *The spirit of the samurai: The Kamakura bakufu, the rise of the bushido, and their role in diplomacy*. Temple University Press.
- Gadjeva, N. (2022). Japan's "kind diplomacy": Conceptualizing Japanese foreign cultural policies. *Ritsumeikan Kokusai Kenkyū*.
- Goncharova, E. (2018). Cultural diplomacy of Japan. *TalTech Journal of European Studies*, 4–32.
- Hobsbawm, E., & Ranger, T. (Eds.). (1983). *The invention of tradition*. Cambridge University Press.
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288.
- Ingvason, I. (2015). The beauty in the simplicity tea ceremony.
- Iwabuchi, K. (2015). Pop-culture diplomacy in Japan: Soft power, nation branding and the question of 'international cultural exchange'. *International Journal of Cultural Policy*, 21(4), 419–432.
- Japan Society. (2012). *Kuromori Kagura folk music & dance from Tohoku*. <https://japansociety.org/events/kuromori-kagura-folk-music-dance-from-tohoku/>

- Japanese Budo Association. (1987). The Budo Charter (Budo Kensho). Nippon Budokan. <https://www.nipponbudokan.or.jp/>
- Johnson, J. A., & Vitale, G. (2018). Transcending taekwondo competition to sustain inter-Korean sports diplomacy.
- Kendo: The way of the sword and samurai spirit 1 — What's cool — Kids Web Japan. (n.d.). Web-Japan.org. Retrieved October 12, 2024, from <https://web-japan.org/kidsweb/cool/12-09/index.html>
- Kristof, N. D. (1997). Japan, Korea and 1597: A year that lives in infamy.
- Kulanov, A. (2007). Russia and Japan: Image wars.
- Kuutma, K. (1998). Festival as communicative performance and celebration of ethnicity.
- Luša, Đ. (2017). The role of food in diplomacy: Communicating and "winning hearts and minds" through food.
- MAFF. (n.d.). The Washoku way: Japan's nuanced approach to food.
- Mark, S. (2009). A greater role for cultural diplomacy.
- METI. (2011). Creating new Japan: Connecting culture and industry, as well as Japan and overseas.
- METI. (2015). On Cool Japan initiative.
- Mikami, T. (2007). The direction of public diplomacy debate.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. SAGE Publications.
- Milhaupt, T. S. (2014). Kimono: A modern history.
- Ministry for Culture and Heritage. (2000). The place of culture in New Zealand's international relations. Ministry for Culture and Heritage.

- MOFA. (2011). Diplomatic bluebook 2011.
- MOFA. (2012). Diplomatic bluebook 2012.
- MOFA. (2013). Diplomatic bluebook 2013.
- MOFA. (2014). Diplomatic bluebook 2014.
- MOFA. (2015). Diplomatic bluebook 2015.
- MOFA. (2016). Diplomatic bluebook 2016.
- MOFA. (2020). Diplomatic bluebook 2020.
- Nagasawa, A. (2011). The problem of public diplomacy for tourist state and its public utility.
- Narroway, L. (2008). Symbols of state ideology: The samurai in modern Japan. In *New Voices* (pp. 63–79). The Japan Foundation.  
<http://dx.doi.org/10.21159/nv.02.04>
- Nieves, F. (2016). The modern samurai: Martial studies & the modernization of the Japanese school system.
- Nukariya, K. (2004). The religion of the samurai: A study of Zen philosophy and discipline in China and Japan.
- Nye, J. S. (2004). Public diplomacy and soft power.
- Otmazgin, N. K. (2012). Geopolitics and soft power: Japan's cultural policy and cultural diplomacy in Asia. 37–61.  
<https://doi.org/10.1080/13439006.2012.678629>
- Parkes, G., & Loughnane, A. (2018). Japanese aesthetics. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford encyclopedia of philosophy*. Stanford University.  
<https://plato.stanford.edu/entries/japanese-aesthetics/>

- Patterson, W. R. (2012). Bushido's role in the growth of pre-World War II Japanese nationalism. *Revista de Artes Marciales Asiáticas*, 3, 8–21.  
<https://doaj.org/article/3f375be116e14dd4850cc04a1a2402fb>
- Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis.
- Petersen, D. (2007). *Invitation to kagura: Hidden gem of the traditional Japanese performing arts*. Lulu Press.
- Pitelka, M. (2008). *The early modern warrior: Three explorations of the samurai life*.
- Prenki, T., & Selman, J. (2003). *Popular theatre in political culture: Britain and Canada in focus*.
- Rappaport, R. A. (1992). *Ritual*.
- Shigeki, U. (2015). Dull bull/philosopher prime minister and intellectuals looking at the Prime Minister Ohira Policy Research Council. *Discuss Japan*.  
<https://www.japanpolicyforum.jp/politics/pt201505272300394915.html>
- Stoeltje, B. J. (1992). *Festival*.
- Tamaki, T. (2019). Repackaging national identity: Cool Japan and the resilience of Japanese identity narratives.
- UNESCO. (2008). Nôgaku theatre. Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. <https://ich.unesco.org/en/RL/nogaku-theatre-00012>
- UNESCO. (2009). Hayachine Kagura. Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. <https://ich.unesco.org/>
- UNESCO. (2010). Yuki-tsumugi, silk fabric production technique. Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

<https://ich.unesco.org/en/RL/yuki-tsumugi-silk-fabric-production-technique-00406>

UNESCO. (2013). Washoku, traditional dietary cultures of the Japanese.

Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

<https://ich.unesco.org/en/RL/washoku-traditional-dietary-cultures-of-the-japanese-notably-for-the-celebration-of-new-year-00869>

USC Center on Public Diplomacy. (2019). Japan is using cultural diplomacy to reassert its place in the world. <https://uscpublicdiplomacy.org/blog/japan-using-cultural-diplomacy-reassert-its-place-world>

Waller, M. J. (2009). Cultural diplomacy, political influence, and integrated strategy.

Xiang, J. (2024). The inheritance and development of traditional martial arts culture in physical education in the new era.

Yoshihide, S. (2016). The evolution of Japan's public diplomacy: Haunted by its past history. In J. Melissen & Y. Sohn (Eds.), *Understanding public diplomacy in East Asia: Middle powers in a troubled region*. Palgrave Macmillan.

Zykas, A. (2011). The discourses of popular culture in 21st century Japan's cultural diplomacy agenda. In *Reception of Japanese and Korean popular culture in Europe*.